

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BONTANG BARAT

LKjIP 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2024.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja pada instansi. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem LKjIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja Kecamatan Bontang Barat dan capaian kinerja Kecamatan Bontang Barat yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 - 2026.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Barat.

Bontang, Februari 2025

Camat Bontang Barat,



Hj. IDA IDRIS, SE

NIP 197701272001122006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Aparatur	2
D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	4
E. Aspek Strategis Organisasi	5
F. Isu Strategis	6
G. Aset Perangkat Daerah	6
H. Keuangan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	8
B. Indikator Kinerja Utama	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
D. Pohon Kinerja	13
E. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan	15
F. Alokasi Anggaran	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Status dan Jumlah Pegawai	3
Tabel 2	: Aset Kecamatan Bontang Barat	7
Tabel 3	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	9
Tabel 4	: Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
Tabel 5	: Target Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 6	: Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
Tabel 7	: Sasaran. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan	16
Tabel 8	: Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	20
Tabel 9	: Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	21
Tabel 10	: Tindak lanjut Evaluasi Sakip Tahun 2023	22
Tabel 11	: Capaian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 12	: Pengukuran Kinerja Organisasi Per Triwulan	24
Tabel 13	: Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022	25
Tabel 14	: Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini (akumulasi) dengan Target Jangka Menengah Organisasi (target akhir Renstra	25
Tabel 15	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
Tabel 16	: Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan	33
Tabel 17	: Pencapaian Target Kinerja Sesuai dengan Pernyataan Kinerja Berdasarkan Program dan Kegiatan	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	: Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Barat Tahun 2024		3
Grafik 2	: Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Bontang Barat.
2. Mendorong Kecamatan Bontang Barat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Bontang Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Bontang Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

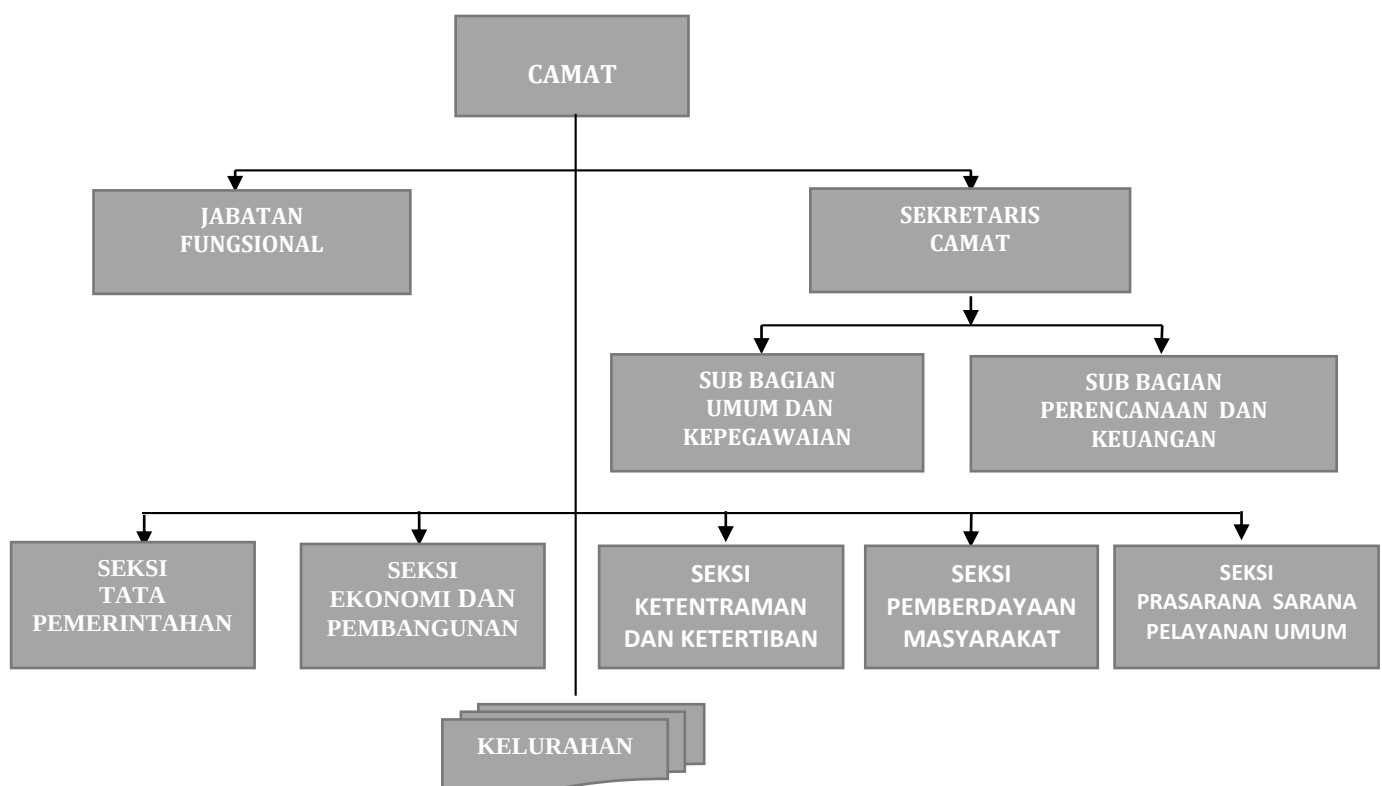
B. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Bontang Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kecamatan Bontang Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Kecamatan Bontang Barat.

Kecamatan Bontang Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang dengan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Lurah terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan :



C. SUMBER DAYA APARATUR

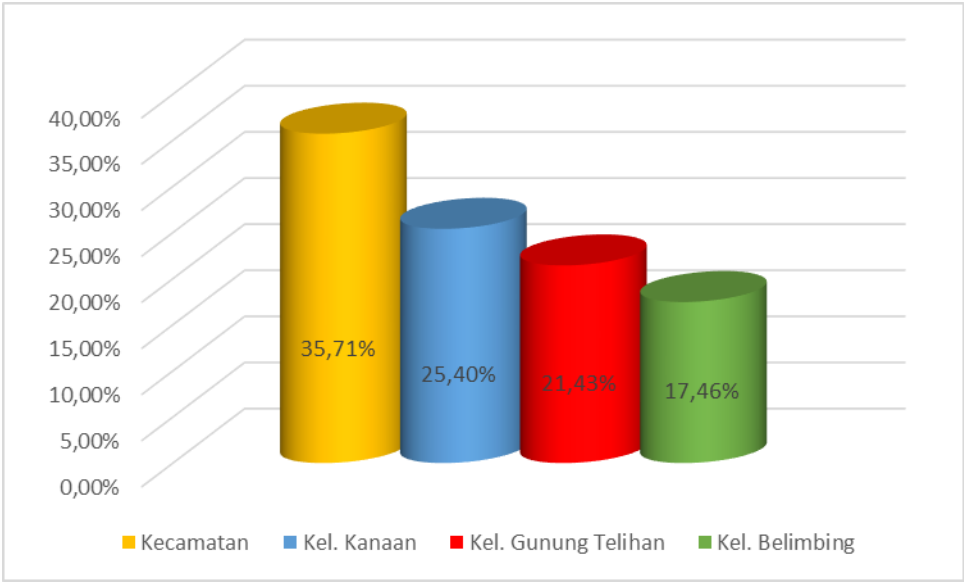
Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi pemerintah secara keseluruhan karena aparatur pemerintah merupakan subyek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Sebaik apapun suatu system tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya apparatur yang professional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menguatkan peran Kecamatan Bontang Barat sebagai simpul pelayanan Pemerintah Kota Bontang. Dengan kaitan tersebut, Peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis untuk dilaksanakan pada saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dalam Rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Bontang Barat mempunyai personil sebanyak 128 orang pegawai terdiri dari 62 orang dengan status pegawai negeri sipil (PNS), dan 66 orang dengan status Non PNS.

Tabel 1 Status dan Jumlah Pegawai

Golongan						Tingkat Pendidikan						Jenis Kelamin	
IV	III	II	I	PPPK	TKD	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Lk	Pr
4	47	10	0	1	64	4	44	13	63	2	0	63	63
126						126						126	

Grafik 1 Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Barat 2024



Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan analisis beban kerja, secara kuantitas sumber daya aparatur telah mencukupi kebutuhan namun dari segi kualitas diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pegawai yang ada di Kecamatan Bontang barat.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Kecamatan Bontang Barat adalah masih belum proposionalnya jumlah aparatur sesuai dengan Analisa jabatan dan beban kerja serta belum tersedianya tenaga Verifikator yang bertanggungjawab secara langsung.

D. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 menetapkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan serta prasarana sarana pelayanan umum dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya;
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penerapan

dan penegakan perda dan perkada;

5. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan masyarakat;
7. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kecamatan Bontang Barat merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sebagai kecamatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, Bontang Barat memiliki berbagai aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan organisasi kecamatannya.

Beberapa aspek strategis yang penting untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bontang Barat antara lain:

1. Perencanaan pembangunan yang berbasis partisipatif merupakan salah satu aspek strategis yang sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan memungkinkan terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), masyarakat dapat memberikan masukan dan prioritas pembangunan yang diinginkan.
2. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Kecamatan Bontang Barat perlu mengadopsi teknologi informasi dalam sistem pelayanan untuk memudahkan akses dan mempercepat proses pelayanan. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur juga menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek strategis yang perlu diperhatikan. Dengan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan urban farming berbasis kemasyarakatan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Penanganan stunting dan kesehatan di tingkat kecamatan melibatkan berbagai upaya yang terkoordinasi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal melalui edukasi dan penyuluhan, pemberian makanan tambahan, pemantauan kesehatan dan gizi yang melibatkan kolaborasi antar sektor.

F. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Bontang Barat, antara lain sebagai berikut:

- a. System kerja pelayanan public masih perlu penyempurnaan dengan basis elektronik;
- b. Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik antar instansi, stakeholder yang ada belum terjalin secara maksimal;
- c. Kondisi ketentraman dan ketertiban belum sepenuhnya kondusif;
- d. Prasarana dan sarana pelayanan dan perkantoran masih perlu ditingkatkan;
- e. Belum berkembangnya potensi ekonomi masyarakat;
- f. Penderita stunting masih cukup tinggi;
- g. Lembaga kemasyarakatan belum memahami perannya sebagai fasilitator di tengah masyarakat;
- h. Infrastruktur pemukiman dan fasilitas umum masih harus ditingkatkan;
- i. Kompetensi SDM tidak sejalan dengan analisa kebutuhan SDM;
- j. Implementasi pembangunan Zona Integritas cenderung bersifat procedural.

G. ASET PERANGKAT DAERAH

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bontang Barat dilengkapi dengan aset berupa tanah, bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset tetap. Aset tersebut sebagian besar sarana dan

prasarana dalam kondisi baik namun demikian tentunya masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, namun hal tersebut diharapkan tidak mengurangi upaya maksimal dalam mendukung tercapainya visi Kota Bontang yaitu “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab.” Adapun aset yang menunjang pelayanan kepada masyarakat tergambar sebagai berikut :

Tabel 2 Aset Kecamatan Bontang Barat

No	Jenis Aset	Jumlah Nilai (Rp)
1	Tanah	3.914.761.000
2	Mesin dan Peralatan	22.119.503.022
3	Gedung dan Bangunan	29.954.881.093
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.208.969.937
5	Aset Tetap Lainnya	117.838.000
6	Konstruksi dalam pengerjaan	1.511.190.044
Jumlah Total Aset		70.827.143.096

H. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Barat pada tahun 2024 berasal dari APBD Kota Bontang. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Bontang Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 53.161.664.873,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 43.159.598.994,00 dan belanja modal sebesar Rp 10.002.065.879,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Kecamatan dan 3 Kelurahan dan diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Memasuki Tahun 2021, Kecamatan Bontang Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Bontang Barat merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Bontang Barat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari evaluasi dan penyempurnaan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Kota Bontang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Bontang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Bontang Barat yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bontang

Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnyanya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Bontang 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab	Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif
			Meningkatnya kondusifitas wilayah
	Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
		Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas
	Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing
			Meningkatnya pemberdayaan sosial

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Bontang Barat mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu pada sasaran:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.
2. Meningkatkan kondusifitas wilayah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Kecamatan Bontang Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 – 2026 yang disesuaikan dengan tugas dan

fungsi Kecamatan. Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 Kecamatan Bontang Barat melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana Nilai Zona Integritas tidak dijadikan Indikator Kinerja Utama. Hal ini disebabkan karena kebijakan dari Evaluator Pemerintah Kota Bontang yang sudah tidak melakukan penilaian Zona Integritas pada masing-masing Perangkat Daerah. Namun perubahan IKU tersebut tidak diikuti dengan melakukan perubahan dokumen Rencana Strategis mengingat periodisasi Rencana Strategis telah memasuki tahun terakhir. Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Kecamatan Bontang Barat serta Indikator Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :



Tabel 4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah Kota Bontang	Camat Bontang Barat
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	$\frac{\text{Jumlah Pokmas yang berpartisipasi dalam program stimulan RT}}{\text{Jumlah Pokmas}} \times 100\%$	Laporan kegiatan fasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat	Camat Bontang Barat
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Laporan Gangguan Trantib yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan Gangguan Trantib}} \times 100\%$	Laporan Ketentraman dan Ketertiban	Camat Bontang Barat

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bontang Barat telah menetapkan target-target capaian kinerja tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 5 Target Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	8	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,91	87	87,1	92,7	92,8	92,9	92,9
2	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Laporan Gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Camat Bontang Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, program kegiatan dan anggaran, sebagaimana tersebut dalam *lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2024*. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tertanggal, 6 Januari 2024.

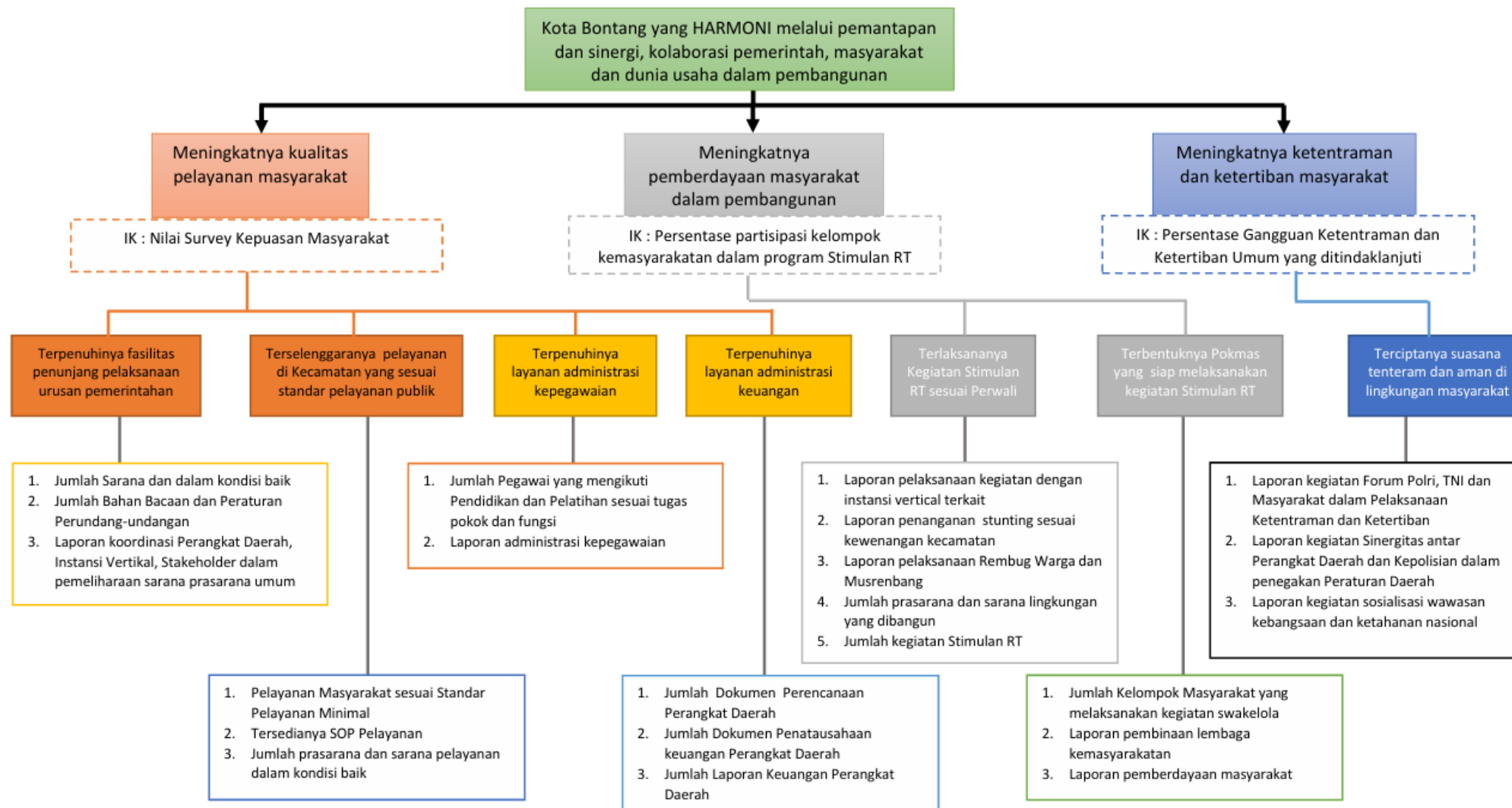
Tabel 6 Perjanjian Kinerja tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,7
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	Prosentase	100%
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Prosentase	100%

D. POHON KINERJA

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

POHON KINERJA TAHUN 2024



E. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran OPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal OPD.
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.



Program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Bontang Barat Tahun 2024 yang mendukung tercapainya sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ada 5 (Lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Keterkaitan antara sasaran kinerja, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan digambarkan dalam table berikut :

Tabel 7 Sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kec. Bontang Barat	1. Penguatan Zona Integritas di lingkungan Kecamatan Bontang Barat 2. Peningkatan sosialisasi pelayanan publik kepada masyarakat 3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia 4. Penguatan koordinasi dan sinergi pemerintah, instansi vertikal dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 5. Peningkatan system kerja pelayanan publik	1. Penataan manajemen SDM 2. Penguatan akuntabilitas 3. Penguatan system pengawasan internal 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Sosialisasi pelayanan PATEN, eKTP, pertanahan, Pemilu 6. Pembinaan Kelurahan 7. Penyusunan dan Review SOP dan SPM 8. Koordinasi dengan stakeholder dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan 9. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pelayanan publik 10. Penyusunan road map SPBE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Vertikal Terkait dengan Perangkat Daerah dan Instansi
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
				Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kec. Bontang Barat	1. Peningkatan pembinaan usaha ekonomi produktif masyarakat 2. Penguatan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 3. Peningkatan infrastruktur pemukiman dan fasilitas umum 4. Peningkatan sosialisasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	1. Pembinaan dan penguatan peran LPM, Karang Taruna, PKK, PPKBK, Forum RT sebagai fasilitator di tengah 2. Penyaluran Dana Stimulan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pemukiman dan fasilitas umum sesuai kewenangan 4. Pembinaan kesejahteraan keluarga 5. Pembinaan PHBS, PAUD, PAAR, Pramuka, UKS dan pembinaan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kec. Bontang Barat	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 2. Peningkatan sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat 3. Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi pemerintah, instansi vertikal dan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan interkoneksi kamera pengawas di wilayah Kecamatan Bontang Barat 2. Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban, Sosialisasi Narkoba 3. Pembinaan dan Penguatan peran FKDM, FKUB, FPK, FKPM 4. Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan TNI/Polri dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

F. ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Bontang Barat melaksanakan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53,161,664,873,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 43.159.598.994,- dan Belanja Modal sebesar Rp 10.002.065.879,-. Adapun alokasi Anggaran Belanja per sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 8 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Prosentase
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat	29,431,660,181	55,36%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat	22,851,689,043	42,99%
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat	878,315,649	1,65%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja pemerintah adalah perwujudan kebijakan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2023

Pada tahun 2024, hasil evaluasi kinerja Kecamatan Bontang Barat yang tertuang dalam surat Inspektur Kota Bontang Tanggal 28 Mei 2024, Nomor : R/700.1.2.1/1571/ITDA/2024, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2023. Kecamatan Bontang Barat Tahun 2022 masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan predikat **BB** dan dengan nilai **78,65**. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP dilingkungan Kecamatan Bontang Barat.

Tabel 9 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,29	27,72
2	Pengukuran Kinerja	30 %	28,61	17,68
3	Pelaporan Kinerja	15 %	13,43	14,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	12,50	18,75
Nilai hasil evaluasi		100	77,83	78,65

Terhadap permasalahan yang dikemukakan, serta mempelajari hasil dokumen SAKIP Kecamatan Bontang Barat, terhadap Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2022,

bahwa Kecamatan Bontang Barat agar menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kota Bontang antara lain :

Tabel 10 tidak lanjut evaluasi sapik TA. 2023

No	Rekomendasi	Tindaklanjuti	Rencana Aksi
1	Penetapan target dalam perencanaan kinerja agar berdasarkan analisa yang memadai dan perhitungan yang logis serta realistis	Melakukan review atas target kinerja dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah dicapai	Melakukan rapat bersama seluruh pejabat structural untuk melakukan review target kinerja
2	Dalam menyusun Rencana Aksi Kinerja agar dipantau kemajuannya secara berkala serta mencari alternative solusi setiap ada perubahan disertakan alternative solusinya	Melakukan evaluasi Rencana Aksi Kinerja per triwulan	- Melakukan rapat bersama seluruh pejabat structural untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja - Merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan
3	Melakukan tindaklanjut atas perbaikan Rencana Aksi sebelumnya	Membuat format rencana aksi yang memuat alternative solusi atas terjadinya perubahan	Membuat format rencana aksi yang memuat alternative solusi atas terjadinya perubahan
1	Dalam pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja untuk lebih memaksimalkan upaya strategi yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan untuk dapat mencapai target yang ditetapkan, dan atau ada kebijakan lain yang dapat mendorong pencapaian kinerja serta melakukan penilaian mandiri atas indikator Zona Integritas agar target yang ditetapkan dapat tercapai	Melakukan evaluasi atas indikator dan target kinerja khususnya yang berkaitan dengan Zona Integritas	- Melakukan rapat bersama seluruh pejabat structural untuk membahas indikator Zona Integritas - Menentukan Indikator Kinerja Tahun 2024
	Data kinerja agar memanfaatkan teknologi/aplikasi internal perangkat daerah yang dapat diakses seluruh pegawai	Memanfaatkan teknologi/aplikasi dalam pengumpulan data kinerja	Membuat google drive dalam rangka pengumpulan data kinerja
	Pengukuran kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) sehingga	Memanfaatkan teknologi/aplikasi dalam pengukuran kinerja	Membuat google drive/ google work pengukuran kinerja

	capaian indicator kinerja dapat diakses dengan mudah tanpa harus melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait		
	Menggunakan aplikasi e-sakip Kota Bontang untuk mengumpulkan data kinerja secara berkala, serta pendokumentasian perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja	Menggunakan aplikasi e-sakip Kota Bontang untuk mengumpulkan data kinerja secara berkala, serta pendokumentasian perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja	Mengisi data-data esakip secara berkala pada aplikasi esakip kinerja
1	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (benchmark kinerja) dalam dokumen laporan kinerja	Melakukan perbandingan data kinerja dengan instansi yang sejenis pada level nasional dan internasional	Melakukan penelusuran perbandingan realisasi kinerja kecamatan dengan indicator yang serupa
1	Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata untuk meningkatkan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program untuk menilai keberhasilan atau kegagalan yang dievaluasi	Menindaklanjuti hasil evaluasi program dan kegiatan	Menyusun Rencana Aksi atas hasil evaluasi program dan kegiatan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Sebagai sebuah pertanggungjawaban kinerja maka LKjIP tidak hanya memuat hasil pengukuran indikator kinerja saja tapi juga harus menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta penjelasan atas pencapaian kinerja tersebut

Pada setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilaksanakan, untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas.

Capaian Kinerja Kecamatan Bontang Barat tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 2024

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kec. Bontang Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,7	94,75	102,21
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kec. Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	%	100	100	100
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kec. Bontang Barat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

Tabel 12 Pengukuran Kinerja Organisasi per Triwulan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2024	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kec. Bontang Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,7	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	92,7	94,75	102,21
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kec. Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	%	100	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	100	100	100
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kec. Bontang Barat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	Triwulan I	100	100	100
					Triwulan II	100	100	100
					Triwulan III	100	100	100
					Triwulan IV	100	100	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 13 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% Peningkatan / Penurunan tahun 2024
1.	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai	86,28	92,60	94,75	2,32%
2	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	%	100	100	100	(statis)
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	(statis)

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 14 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (akumulasi) dengan target jangka menengah organisasi (target akhir Renstra)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d. 2024	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai	94,75	92,90	101,99
Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	%	100	100	100
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional

a. Survey Kepuasan Masyarakat

Salah satu Kecamatan di Indonesia yang menggunakan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Kinerja Utama adalah Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Teknik pelaksanaan survey berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 14 Tahun 2017 Penyusunan Survei tentang Pedoman Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana terdapat 9 (sembilan) unsur penilaian survey yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu pelayanan; biaya/tariff; produk,

spesifikasi dan jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; penanganan pengaduan. Skala yang digunakan mengacu pada skala likert (1-4). Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Banjar Semester I Tahun 2004 sebesar 87,5 (Baik)¹

Metode yang digunakan dalam Survey sama dengan yang digunakan Pemerintah Kota Bontang dan Kecamatan Bontang Barat, namun hasil yang didapat berbeda dimana kecamatan Bontang Barat pada tahun 2023 telah memperoleh nilai 92,60 (Baik Sekali) dan tahun 2024 memperoleh nilai 94,75 (baik sekali)

b. Pemberdayaan Masyarakat

Terkait indikator pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Bontang Barat melakukan Banchmarking dengan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Adapun indikator yang digunakan adalah "Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan". Teknik pengukuran kinerja tidak digambarkan secara spesifik menggunakan formula perhitungan. Hasil pengukuran keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan di Kecamatan Pontianak Tenggara sebesar 95% dari target 95%.²

Berbeda dengan Kecamatan Bontang Barat, dimana pengukuran pemberdayaan masyarakat diukur secara spesifik berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat (Pokmas) dalam program stimulant RT. Hal ini dilakukan karena program stimulant RT merupakan program unggulan Pemerintah Kota Bontang. Adapun tingkat keterlibatan Pokmas dalam Program Stimulan RT di Kecamatan Bontang Barat sebesar 100%

¹https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiuuex8uqLAXVQn2MGH WmRD_8QFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fbanjar.bulelengkab.go.id%2Finformasi%2Fdownload%2F94_ikm-tahun-2024-semester-i.pdf&usg=AOvVaw2wgbDFTki66N_-93zGzuHO&opi=89978449

²<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiy8p2ijOuLAXW-SmwGHUQ2O7w4KBAWegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Fkecptktenggara.pontianak.go.id%2Ffile%2Flaporan%2F4bd56f8b1d32c3fef75d274bda2a4891LKjIP%2520Kecamatan%2520Pontianak%2520Tenggara%2520Tahun%25202023.pdf&usg=AOvVaw1geePg65Q6RrZUTN6h7XJO&opi=89978449>

c. Ketentraman dan Ketertiban

Demikian juga dengan indikator Ketentraman dan ketertiban Masyarakat. Indikator sasaran yang digunakan adalah " Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan". Indikator ini tidak digambarkan secara spesifik formulasi perhitungannya. Capaian indicator Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Pontianak Tenggara sebesar 95% dari target 95%.²

Berbeda dengan Kecamatan Bontang Barat, dimana dalam perhitungan capaian indicator sasaran Ketentraman dan Ketertiban menggunakan formula yang jelas dan data-data yang terukur. Adapun tingkat penyelesaian laporan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bontang Barat sebesar 100%

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja digambarkan sebagai berikut :

a. Pelayanan kepada masyarakat

Sebagai instansi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Bontang Barat berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan adalah Survey Kepuasan Masyarakat yang diadakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang. Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Bontang Barat.

²<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy8p2ijOuLAXW-SmwGHUQ2O7w4KBAWegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Fkecptktenggara.pontianak.go.id%2Ffile%2Flaporan%2F4bd56f8b1d32c3fe75d274bda2a4891LKjIP%2520Kecamatan%2520Pontianak%2520Tenggara%2520Tahun%25202023.pdf&usq=AOvVaw1geePg65Q6RrZUTN6h7XJO&opi=89978449>

Survey ini meliputi pelayanan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban dan pelayanan dalam fasilitas pelayanan umum baik di Kecamatan maupun di Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Bontang Barat.

Pada tahun 2024 target untuk nilai SKM ditetapkan dengan nilai 92,7. Dalam upaya pencapaian target tersebut, Kecamatan Bontang Barat dapat melampaui target yang ditetapkan, dan memperoleh nilai 94,75 atau secara prosentase pencapaian realisasi kinerja sebesar 102,21%. Nilai SKM ini merupakan nilai rata-rata dari semua unit pelayanan di Kecamatan Bontang Barat.

Kecamatan Bontang Barat telah melakukan serangkaian perbaikan dan peningkatan mutu layanan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan Survey Kepuasan Masyarakat. Perbaikan tersebut antara lain :

- Perbaikan SOP dan SPM yang dipublikasikan baik secara online maupun offline
- Peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu layanan
- Peningkatan mutu layanan melalui digitalisasi sistem pelayanan. Digitalisasi sistem pelayanan telah dilakukan walaupun belum diterapkan secara komprehensif di semua unit layanan. Hal ini disebabkan karena :
 - Perlunya penyeragaman sistem pelayanan secara online di seluruh perangkat daerah se-Kota Bontang, yang tentu saja memerlukan kajian yang mendalam dan memerlukan waktu yang panjang
 - Tingkat pemahaman masyarakat terutama RT yang beragam terhadap digitalisasi layanan, sehingga perlu kebijakan yang dapat mengakomodir seluruh pihak yang terkait dengan layanan kecamatan

Untuk perbaikan mutu layanan ke depan, Kecamatan Bontang Barat akan mengambil langkah-langkah antara lain

- Mereview SOP dan SPM sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan publik

- Meningkatkan Kompetensi petugas layanan melalui pendidikan dan pelatihan
- Menyusun waktu pelayanan yang dapat mengakomodir kebutuhan publik
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pelayanan
- Mengintensipkan layanan pengaduan

b. Pemberdayaan masyarakat

Salah satu program prioritas Pemerintah Kota Bontang adalah pemberian stimulus untuk masyarakat dalam usaha peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa salah satu fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam mengukur pemberdayaan masyarakat adalah prosentase partisipasi kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program stimulan RT.

Dalam melaksanakan Program Stimulan RT, Kecamatan Bontang Barat menggunakan metode pengadaan swakelola type 4, dimana kegiatan yang dilaksanakan berasal dari usulan masyarakat, serta dilaksanakan dan diawasi juga oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Pada tahun 2024 terdapat 14 (empat belas) Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdapat di wilayah Kecamatan Bontang Barat dengan sebaran 8 (delapan) Pokmas di Kelurahan Belimbing, 4 (empat) Pokmas di Kelurahan Gunung Telihan dan 2 (dua) Pokmas di Kelurahan Kanaan.

Dalam pelaksanaan Program Stimulan RT tahun 2029, semua Pokmas di wilayah Kecamatan Bontang Barat berpartisipasi aktif dan bertanggungjawab langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan, sehingga diharapkan dampaknya kegiatan ini dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Yang menjadi catatan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah jumlah anggaran yang belum sebanding dengan aspirasi masyarakat. Terkait dengan besaran alokasi anggaran tentunya memerlukan koordinasi lebih lanjut

dengan instansi yang terkait, namun secara tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Barat telah melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan baik.

c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan merupakan turunan dari sasaran RPJMD 2021-2026 Kota Bontang yaitu meningkatkan kondusifitas wilayah. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bontang Barat adalah tingkat penyelesaian laporan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan.

Pada tahun 2024 terdapat 10 laporan/kasus yang terjadi di Kecamatan Bontang Barat berupa kasus perkelahian, pencurian, prostitusi, mabuk-mabukan dan ODGJ. Namun demikian potensi-potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diredam sedini mungkin dan dilakukan penyelesaian secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Kecamatan dalam menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat juga tidak terlepas dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh Tim Patroli Kecamatan yang terdiri dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban di semua unit kerja kecamatan, Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan, Forum Komunikasi Polri dan Masyarakat (FKPM), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) beserta tokoh masyarakat, tokoh paguyuban.

Selain itu Kecamatan Bontang Barat rutin mengadakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban di semua tingkat elemen masyarakat.

6. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator-indikator tersebut

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan sebagai tabel berikut :

*Tabel 15 Efisiensi penggunaan sumber daya*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase	Anggaran	Realisasi Keuangan	Prosentase	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai	92,7	94,75	102,21	29,431,660,181	28,392,221,833	96,47	5,74
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	Persen	100	100	100	22,851,689,043	22,494,234,964	98,44	1,56
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	878,315,649	856,852,750	97,56	2,44

Tabel 16 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Keuangan		Realisasi % Fisik %	Sisa Pagu	Tingkat Efisiensi
			Realisasi	Realisasi %			
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.404.569.706,00	25.461.493.941,00	96,43	100,00	943.075.765,00	3,57
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.055.093.465,00	11.852.146.292,00	98,32	100,00	202.947.173,00	1,68
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.055.087.375,00	11.852.146.292,00	98,32	100,00	202.941.083,00	1,68
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.090,00	-	-	-	6.090,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.396.888.535,00	2.279.475.791,00	95,10	100,00	117.412.744,00	4,90
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	277.556.535,00	267.930.000,00	96,53	100,00	9.626.535,00	3,47
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.510.000,00	26.960.000,00	91,36	100,00	2.550.000,00	8,64
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	763.322.000,00	697.117.210,00	91,33	100,00	66.204.790,00	8,67
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	663.860.000,00	643.343.621,00	96,91	100,00	20.516.379,00	3,09
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	218.040.000,00	209.774.960,00	96,21	100,00	8.265.040,00	3,79
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	444.600.000,00	434.350.000,00	97,69	100,00	10.250.000,00	2,31
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.699.137.489,00	4.512.069.548,00	96,02	100,00	187.067.941,00	3,98
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.552.300,00	13.258.650,00	97,83	100,00	293.650,00	2,17
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332.603.258,00	320.224.740,00	96,28	100,00	12.378.518,00	3,72
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	547.487.936,00	526.266.620,00	96,12	100,00	21.221.316,00	3,88
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	566.474.094,00	550.045.400,00	97,10	100,00	16.428.694,00	2,90
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	401.500.698,00	389.095.500,00	96,91	100,00	12.405.198,00	3,09
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.116.383,00	44.221.000,00	84,85	100,00	7.895.383,00	15,15
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.830.185,00	32.730.025,00	61,95	100,00	20.100.160,00	38,05
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.203.476,00	18.113.945,00	71,87	100,00	7.089.531,00	28,13
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.371.171,00	31.549.000,00	86,74	100,00	4.822.171,00	13,26
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.773.573,00	56.882.960,00	92,08	100,00	4.890.613,00	7,92
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000,00	4.290.000,00	91,67	100,00	390.000,00	8,33
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.792.400,00	38.288.000,00	93,86	100,00	2.504.400,00	6,14
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	106.560.000,00	88.800.000,00	83,33	100,00	17.760.000,00	16,67
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	177.235.200,00	125.793.000,00	70,98	100,00	51.442.200,00	29,02
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.786.645,00	418.594.760,00	99,72	100,00	1.191.885,00	0,28

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.403.000,00	362.662.944,00	99,25	100,00	2.740.056,00	0,75
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	473.468.170,00	470.981.924,00	99,47	100,00	2.486.246,00	0,53
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.021.299.000,00	1.020.271.080,00	99,90	100,00	1.027.920,00	0,10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.286.978,00	329.186.310,00	96,74	100,00	11.100.668,00	3,26
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.441.173,00	92.562.310,00	95,98	100,00	3.878.863,00	4,02
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	243.845.805,00	236.624.000,00	97,04	100,00	7.221.805,00	2,96
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.608.116.784,00	5.264.854.983,00	93,88	100,00	343.261.801,00	6,12
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.000.000,00	222.120.752,00	60,69	100,00	143.879.248,00	39,31
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.010.000,00	55.363.737,00	75,83	100,00	17.646.263,00	24,17
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.100.000,00	95.763.901,00	93,79	100,00	6.336.099,00	6,21
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.298.000,00	70.263.135,00	95,86	100,00	3.034.865,00	4,14
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.993.708.784,00	4.821.343.458,00	96,55	100,00	172.365.326,00	3,45
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.305.046.455,00	1.223.761.017,00	93,77	100,00	81.285.438,00	6,23
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.728.000,00	179.025.500,00	99,06	100,00	1.702.500,00	0,94
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.740.500,00	6.152.420,00	70,39	100,00	2.588.080,00	29,61
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.870.687,00	140.471.450,00	96,96	100,00	4.399.237,00	3,04
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.003.093,00	97.138.650,00	90,78	100,00	9.864.443,00	9,22
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.860.000,00	120.781.885,00	91,60	100,00	11.078.115,00	8,40
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.133.930,00	42.140.250,00	89,41	100,00	4.993.680,00	10,59
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.007.000,00	20.830.000,00	99,16	100,00	177.000,00	0,84
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.768.325,00	23.784.305,00	96,03	100,00	984.020,00	3,97
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	451.083.580,00	441.595.165,00	97,90	100,00	9.488.415,00	2,10
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.671.340,00	9.564.500,00	89,63	100,00	1.106.840,00	10,37
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.770.000,00	68.958.390,00	98,84	100,00	811.610,00	1,16



7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.410.000,00	73.318.502,00	68,26	100,00	34.091.498,00	31,74
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.027.090.475,00	2.930.727.892,00	96,82	100,00	96.362.583,00	3,18
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	661.523.018,00	651.110.504,00	98,43	100,00	10.412.514,00	1,57
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	631.475.740,00	621.412.804,00	98,41	100,00	10.062.936,00	1,59
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.047.278,00	29.697.700,00	98,84	100,00	349.578,00	1,16
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.191.533.457,00	2.145.243.220,00	97,89	100,00	46.290.237,00	2,11
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	48.005.517,00	46.181.000,00	96,20	100,00	1.824.517,00	3,80
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.107.371.089,00	1.095.479.041,00	98,93	100,00	11.892.048,00	1,07
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.036.156.851,00	1.003.583.179,00	96,86	100,00	32.573.672,00	3,14
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	174.034.000,00	134.374.168,00	77,21	100,00	39.659.832,00	22,79
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	174.034.000,00	134.374.168,00	77,21	100,00	39.659.832,00	22,79
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.851.689.043,00	22.494.234.964,00	98,44	100,00	357.454.079,00	1,56
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.587.176.707,00	9.470.661.111,00	98,78	100,00	116.515.596,00	1,22
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.960.157,00	14.815.000,00	99,03	100,00	145.157,00	0,97
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.006.575,00	17.752.000,00	98,59	100,00	254.575,00	1,41
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.713.767,00	30.518.000,00	99,36	100,00	195.767,00	0,64
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.539.783.097,00	1.531.181.676,00	99,44	100,00	8.601.421,00	0,56
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.746.852.700,00	2.734.643.600,00	99,56	100,00	12.209.100,00	0,44
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.767.829.884,00	3.748.602.621,00	99,49	100,00	19.227.263,00	0,51
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.995.438,00	84.760.120,00	99,72	100,00	235.318,00	0,28
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	285.788.984,00	278.696.500,00	97,52	100,00	7.092.484,00	2,48

7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	420.945.609,00	367.176.342,00	87,23	100,00	53.769.267,00	12,77
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	677.300.496,00	662.515.252,00	97,82	100,00	14.785.244,00	2,18
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.188.396.369,00	12.948.470.655,00	98,18	100,00	239.925.714,00	1,82
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	389.819.617,00	375.034.420,00	96,21	100,00	14.785.197,00	3,79
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	933.316.292,00	910.402.245,00	97,54	100,00	22.914.047,00	2,46
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.511.751.310,00	1.492.620.800,00	98,73	100,00	19.130.510,00	1,27
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4.422.475.510,00	4.292.131.940,00	97,05	100,00	130.343.570,00	2,95
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	927.893.640,00	919.279.240,00	99,07	100,00	8.614.400,00	0,93
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.842.432.000,00	1.822.070.800,00	98,89	100,00	20.361.200,00	1,11
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.160.708.000,00	3.136.931.210,00	99,25	100,00	23.776.790,00	0,75
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	76.115.967,00	75.103.198,00	98,67	100,00	1.012.769,00	1,33
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	16.756.523,00	16.350.000,00	97,57	100,00	406.523,00	2,43
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	17.608.523,00	17.083.800,00	97,02	100,00	524.723,00	2,98
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	41.750.921,00	41.669.398,00	99,80	100,00	81.523,00	0,20
7.1.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	468.502.711,00	456.850.300,00	97,51	100,00	11.652.411,00	2,49
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	405.720.546,00	396.695.500,00	97,78	100,00	9.025.046,00	2,22
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	53.520.000,00	52.963.500,00	98,96	100,00	556.500,00	1,04
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	124.835.863,00	122.904.000,00	98,45	100,00	1.931.863,00	1,55
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	227.364.683,00	220.828.000,00	97,13	100,00	6.536.683,00	2,87
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	62.782.165,00	60.154.800,00	95,82	100,00	2.627.365,00	4,18



7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	62.782.165,00	60.154.800,00	95,82	100,00	2.627.365,00	4,18
7.1.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	409.812.938,00	400.002.450,00	97,61	100,00	9.810.488,00	2,39
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	409.812.938,00	400.002.450,00	97,61	100,00	9.810.488,00	2,39
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	262.191.087,00	260.885.350,00	99,50	100,00	1.305.737,00	0,50
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.888.523,00	48.635.000,00	87,02	100,00	7.253.523,00	12,98
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56.801.328,00	55.996.100,00	98,58	100,00	805.228,00	1,42
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.932.000,00	34.486.000,00	98,72	100,00	446.000,00	1,28
		53.161.664.873,00	51.743.309.547,00	97,33	100,00	1.418.355.326,00	2,67

Berdasarkan table 16 dan 17 di atas Kecamatan Bontang Barat telah melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian target kinerja. Hal itu terlihat dari realisasi kinerja yang lebih besar dari penggunaan sumber daya. Demikian juga dengan penggunaan anggaran, dimana Kecamatan Bontang Barat dapat melakukan efisiensi anggaran pada hampir seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan total efisiensi sebesar 2,67% tanpa mengurangi ketercapaian target kinerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kecamatan Bontang Barat pada tahun 2024 melaksanakan 5 Program, 15 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diarahkan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, dan semua target-target kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai. Secara singkat program-program yang mendukung pencapaian target kinerja sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang barat". Beberapa hal yang diprioritaskan dalam program ini yang menunjang kinerja antara lain :

- Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik
- Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan manajemen SDM
- Penguatan pengawasan dan akuntabilitas dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan

Program ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik dengan tingkat realisasi 100%

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat". Beberapa hal yang diprioritaskan dalam program ini antara lain :

- Peningkatan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penyusunan SOP yang dapat diakses baik melalui media online maupun offline
- Koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah, instansi vertikal maupun stakeholder yang ada di Kota Bontang dalam peningkatan pelayanan publik
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

Program ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik dengan tingkat realisasi 100%

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran "Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat". Beberapa hal yang menjadi prioritas dan program ini antara lain :

- Pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang berimplikasi langsung terhadap kehidupan dan lingkungan masyarakat
- Peningkatan derajat kehidupan masyarakat baik melalui pemberian stimulan, pembinaan/sosialisasi maupun melakukan intervensi secara langsung

Program ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik dengan tingkat realisasi 100%

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran "Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat". Beberapa hal yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain :

- Peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, TNI/Polri, lembaga kemasyarakatan, forum kemasyarakatan, paguyuban maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban
- Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban dengan sasaran lembaga/forum kemasyarakatan, paguyuban maupun masyarakat dalam berbagai tingkatan
- Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan ketentraman dan ketertiban

Program ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik dengan tingkat realisasi 100%

8. Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17 pencapaian target kinerja sesuai dengan Pernyataan Kinerja berdasarkan program dan kegiatan

Realisasi Kinerja - Kecamatan Bontang Barat Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Persen	Predikat
T.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
T.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	4	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	ST
T.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	65	65.00	65.00	65.00	65.00	100.00	ST
T.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	65	22.00	14.00	15.00	14.00	100.00	ST
T.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ST
T.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	ST
T.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Karsan)	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	ST
T.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	2.00	7.00	7.00	4.00	100.00	ST
T.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Karsan)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	81	11.00	25.00	27.00	18.00	100.00	ST
T.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	0.00	1.00	2.00	1.00	100.00	ST
T.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	94	30.00	30.00	0.00	34.00	100.00	ST
T.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ST
T.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	ST
T.01.01.2.06.0002 Penyediaan Perlengkapan dan Perengkapan Kantor (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	2.00	4.00	2.00	3.00	100.00	ST
T.01.01.2.06.0002 Penyediaan Perlengkapan dan Perengkapan Kantor (Kelurahan Karsan)	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.00	5.00	4.00	2.00	100.00	ST
T.01.01.2.06.0002 Penyediaan Perlengkapan dan Perengkapan Kantor (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	ST
T.01.01.2.06.0002 Penyediaan Perlengkapan dan Perengkapan Kantor (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	0.00	0.00	4.00	6.00	100.00	ST
T.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	ST
T.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	ST
T.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Karsan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1.00	2.00	2.00	1.00	100.00	ST
T.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	ST

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Persentase	Predikat
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	ST
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1,095	0.00	165.00	280.00	650.00	100.00	ST
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Kananan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0.00	4.00	4.00	4.00	100.00	ST
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	ST
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	ST
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	56	5.00	6.00	25.00	20.00	100.00	ST
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Kananan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	ST
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	2.00	3.00	3.00	3.00	100.00	ST
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.00	2.00	4.00	5.00	100.00	ST
7.01.01.2.07.0000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ST
7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	13	0.00	8.00	2.00	3.00	100.00	ST
7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Belimbing)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	63	0.00	0.00	0.00	63.00	100.00	ST
7.01.01.2.08.0000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	100	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ST
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	ST
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Kananan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	ST
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	ST
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	ST
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	ST
7.01.01.2.09.0000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ST

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Persen	Predikat
T.D1.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	4.00	5.00	9.00	0.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	6.00	3.00	6.00	3.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Karsan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	7.00	2.00	5.00	4.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	4.00	2.00	3.00	2.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	2.00	0.00	4.00	4.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Karsan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	2.00	2.00	8.00	5.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	6.00	6.00	8.00	8.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	0.00	4.00	15.00	3.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Karsan)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	ST
T.D1.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	54	18.00	16.00	20.00	0.00	100.00	ST
T.D1.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
T.D1.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
T.D1.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	ST
T.D1.02.2.01.0002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	ST
T.D1.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Jumlah Kegiatan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Persen	Predikat
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	ST
7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	2.00	0.00	1.00	1.00	100.00	ST
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	ST
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persen	100	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ST
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	ST
7.01.03 PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah	100	10.00	15.00	40.00	35.00	100.00	ST
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Karsan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	6	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ST
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	6	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ST
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	6	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ST
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karsan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	22	0.00	2.00	8.00	12.00	100.00	ST
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	ST
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	21	0.00	0.00	5.00	16.00	100.00	ST
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	1	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	ST
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karsan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	6	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	ST
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	30	7.00	8.00	8.00	7.00	100.00	ST
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	2	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	ST
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah	6	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	ST
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga	6	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	ST
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Kemasyarakatan	6	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	ST

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Persen	Predikat
Kemasyarakatan (Kelurahan Karsan)	Dialenggangkan								
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dialenggangkan	Kemasyarakatan	6	1.00	1.00	2.00	2.00	100.00	ST
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dialenggangkan	Kemasyarakatan	6	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	ST
7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Karsan)	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	ST
7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	ST
7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	ST
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Karsan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	29	0.00	9.00	10.00	10.00	100.00	ST
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	39	0.00	0.00	39.00	0.00	100.00	ST
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	50	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	ST
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trinitium (kec bontang barat)	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	30.00	25.00	40.00	5.00	100.00	ST
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Peningkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Peningkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	ST
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karsan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	ST
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	ST
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	ST
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat)	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum		100	40.00	15.00	30.00	15.00	100.00	ST

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Persentase	Predikat
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	150	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	ST
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Karan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	150	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	ST
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Gunung Talihan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	150	0.00	0.00	150.00	0.00	100.00	ST
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	ST

B. REALISASI ANGGARAN

Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kecamatan Bontang Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp.53.161.664.873,00**. Realisasi anggaran sebesar **Rp.1.743.309.547,00** dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran sebesar **Rp.1.418.355.326,00**, dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar **2,67%**. Sisa lebih anggaran tahun 2024 sebagian besar didominasi oleh belanja pegawai dan efisiensi penggunaan anggaran.

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel 16: *Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian pelaporan LKjIP ini merupakan sarana bagi Kecamatan Bontang Barat untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bontang Barat secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilaksanakan. Peningkatan kinerja di Kecamatan Bontang Barat tetap harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

B. SARAN

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian target Kecamatan Bontang Barat ke depan berupaya untuk mengatasi masalah serta kendala yang ada, dengan kiat pemecahan sebagai berikut:

- 1 Agar visi dan misi serta program - program yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, maka Kecamatan Bontang Barat akan lebih meningkatkan ketelitian dalam perencanaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan kesatuan yang terintegrasi, bersinergi dan berkesinambungan;
- 2 Agar kinerja personil pengelola kegiatan dapat ditingkatkan maka disarankan bimbingan teknis baik dibidang keuangan maupun administrasi kegiatan dari Pemerintah Kota Bontang secara rutin

- 3 Agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan maka pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kota perlu ditingkatkan, selain itu diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bontang Barat

Bontang, Februari 2025

Camat Bontang Barat,



Hj. IDA IDRIS, SE
NIP 197701272001122006